

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia banyak sekali isu-isu Politik, Ekonomi, Budaya, Agama yang beredar di masyarakat baik yang positif atau negatif. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam memutuskan sebuah peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat mendapatkan bermacam-macam respon sehingga ada yang dapat merima dan ada juga yang menolak. Pada Tahun 2020 Pemerintah Mengesahkan Omnibuslaw Cipta Kerja yang mengundang banyak kontroversi dikalangan masyarakat bahkan ribuan Mahasiswa dan Buruh melakukan Demo di beberapa kota di Indonesia. Beberapa hal yang dikeluhkan diantaranya pengambilan keputusan Omnibuslaw Cipta Kerja yang tidak terlalu transparan. Seperti berita yang telah dilansir oleh Kompas.com Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Bapak Zainal Arifin Mochtar bahwa pembuatan UU Cipta Kerja tidak transparan Ketika merumuskan dan mengesahkannya. Selain itu partisipasi publik dalam UU Cipta Kerja ini tidak terlalu dilibatkan hal ini membuat banyak kecurigaan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu ada beberapa kasus lain yang mengundang kontroversi yaitu adanya tindak pidana korupsi yang sejak beberapa tahun sering terjadi. Di tahun 2019 terjadi aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di beberapa daerah terkait RUU KPK yang dinilai malah melemahkan KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi di Indonesia (Detik.com). ada 26 pasal yang dianggap dapat melemahkan

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diantaranya diletakan sebagai Lembaga negara rumpun Eksekutif, (Diansyah, 2019)

Pada tahun 2011 terkuak tindak pidana korupsi yang menyeret nama M. Nazarudin yang merupakan mantan Bendahara Partai Demokrat atas kasus suap wisma atlet sebanyak 4,8 Milyar beserta Wafid Muharram (Mantan sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga) dan Mindo Rosalina Manulang (Direktur Pemasaran PT. Anak Negeri). Setelah M Nazarudin ditangkap dan diperiksa, beberapa kasus korupsi berhasil dikuak diantaranya kasus korupsi Anas Urbaningrum terkait proyek wima Atlet Hambalang dan kasus korupsi Setya Novanto (mantan ketua DPR RI) terkait E-KTP (Nabil, 2020)

Di periode pemerintahan 2004-2009 sebanyak 50 anggota komisi IV DPR diduga terjerat Tindak Pidana Korupsi terkait alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Apiapi Sumatera Selatan dan setelah dilakukan penyelidikan anggota yang terbukti melakukan korupsi diantaranya Yusuf Erwin fishal (Ketua Komisi), Azwar Chesputra, Hilman Indra, Fahri Andi Leluasa, Al Amin Nasution. Sarjan Tahir (detiknews.com, 2021)

Dengan adanya contoh beberapa kasus diatas yang terjadi di Indonesia menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan publik diantaranya adalah wakil-wakil rakyat di legislatif yaitu anggota DPR. Dari beberapa kasus yang muncul publik seakan bertanya apakah wakil-wakil rakyat yang menduduki legislatif berpihak kepada masyarakat atau tidak. Penilaian dari publik ada yang positif dan ada juga yang negatif. Wakil rakyat yang menduduki perwakilan baik di legislatif atau eksekutif tentu mempunyai partai-partai sebagai kendaraan mereka untuk mendapatkan jabatan tersebut. Yang menjadi kendaraannya adalah partai politik.

Salah satu organisasi yang ada di pemerintahan adalah partai politik. Partai politik di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup Panjang. ada beberapa partai politik yang sudah ada sejak lama ataupun yang baru berdiri di beberapa tahun kebelakang. Partai politik di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan tahun 1945. Pada masa penjajahan belanda tahun 1908 muncul organisasi pergerakan nasional untuk priyai bernama Boedi Oetomo. Partai pertama yang yang memperjuangkan hindia adalah organisasi indische partij (Desember 1912). Dikuti oleh ISDV (*Indichase social democratishe veregining*) Mei 1914, Indische Katholike Partij November tahun 1918, PKI (Mei 1920), PNI (Juli 1924), Partai Rakyat Indonesia (September 1930), Parindra (Januari 1931), Partai Indonesia (April 1931), dan Gerindo (Mei 1937). Organisasi tersebut berasal dari beberapa ideologi seperti Islam, Sekuler, Nasionalis, dan Komunikasi (Kusumaningsih, 2019)

Kehadiran partai politik seharusnya mampu menjadi sebuah wadah untuk masyarakat dalam menampung berbagai macam keluhan mengenai pemerintahan. Saat ini Ada beberapa partai politik di Indonesia diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Pesatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani (HANURA), Partai Demokrat, Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP).

Diantara sekian banyak partai politik di Indonesia salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu partai yang sudah populer di Indonesia terhitung

sejak didirikannya pada tanggal 23 Juli 1998 atas dasar masukan dari warga Nahdatul Ulama (NU) membuat Partai Politik untuk mewadahi aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Partai yang didirikan oleh para tokoh-tokoh ulama seperti KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU) ([pkb.id](http://pkb.id)). Sejak keterlibatannya pada persaingan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selalu menjadi partai yang diperhtungkan.

Pada pemilu tahun 1999 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Gus Dur berhasil menduduki peringkat keempat dengan perolehan 13.336.982 suara. Pada pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduduki peringkat 6 dengan perolehan suara 12.002.885 suara. Keberhasilan PKB tahun 1999-2009 di tingkat Nasional tidak dapat terlepas dari citra seorang Gusdur. Gusdur yang juga merupakan anak pendiri NU berusaha masuk berkomonikasi politik melalui jaringan pesantren-pesantren yaitu dengan mendekati para kiyai dan santri-santri. Selain itu sosok gudur terkenal sebagai tokoh nasional dan intelektual pernah mengikuti seminar, konferensi, organisasi tingkat internasional membuat masyarakat bersimpati terhadapnya. Beliau juga merupakan presiden ke 4 Republik Indonesia yang banyak didukung oleh warga Nahdliyin. Dari beberapa hal tersebut sosok Gusdur dapat dijadikan alat komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk dapat memperoleh suara dari masyarakat.

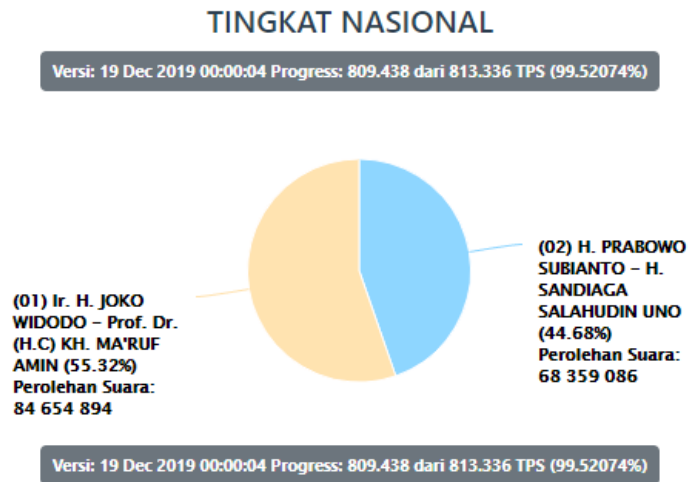
Namun pada pemilu tahun 2009-2014 PKB mengalami penurunan perolehan suara dan hanya mendapatkan 5.146.302 suara ([KPU.go.id](http://KPU.go.id)). Hal tersebut disebabkan

adanya konflik Internal Partai yaitu pemecatan Ketua Umum Muhaimin Iskandar oleh Ketua Dewan Syura Adurahman Wahid (Gus dur). Setelah itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjuang dengan basis nasionalis religius akhirnya di pemilu 2014 Kembali dapat menduduki peringkat 5 besar dengan perolehan 11.298.957 (9,04 Persen) Suara (Prabowo, 2014)

Pada masa kepemimpinan Muhaimin Iskandar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai yang mencoba untuk memasukan konsep modern sehingga menjadi lebih terbuka terhadap perubahan zaman. Rencana tersebut disampaikan pada Muktamar di bali 2019. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berusaha untuk merangkul anak muda agar mau bergabung dengan partai politik. Tentu ini menjadi rencana yang positif untuk partai dalam merancang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di masa yang akan datang. Terbukti rencana tersebut berdampak pada perolehan suara Partai di pemilu 2019.

Pada pemilu 2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkoalisi dengan beberapa partai yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam mengusung Calon Presiden Ir. Jokowi dan Wakil Presiden Kh. Ma'ruf Amin. Sedangkan diposisi yang berlawanan ada Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Berkarya yang mengusung calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Salahudin Uno. Dengan proses yang begitu ketat dan sengit akhirnya Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 1 yaitu Ir. Jokowi dan Kh. Ma'ruf Amin menang dengan perolehan suara 84.654.894 Suara (55.32%) sedangkan pesaingnya yaitu pasangan

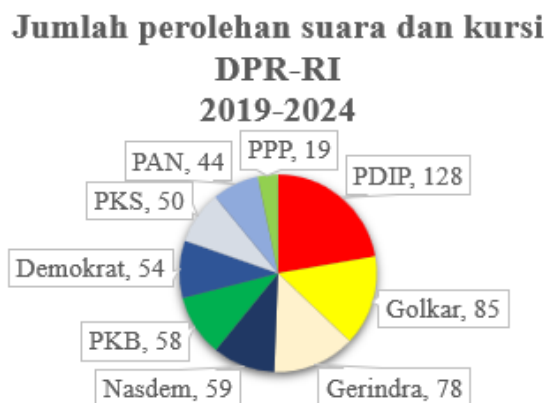
calon Presiden dan Wakil Presiden No.Urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno memperoleh suara 68.359.086 suara (44.68%). (KPU.go,id).



Gambar 1. 1 Perolehan suara Pilpres 2019

Sumber : KPU.go.id

Sementara untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pemilu 2019 mengalami kenaikan dengan menempati posisi keempat memperoleh 13.570.097 suara (9,96%). Diposisi pertama ditempati oleh PDIP dengan 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 Kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi.



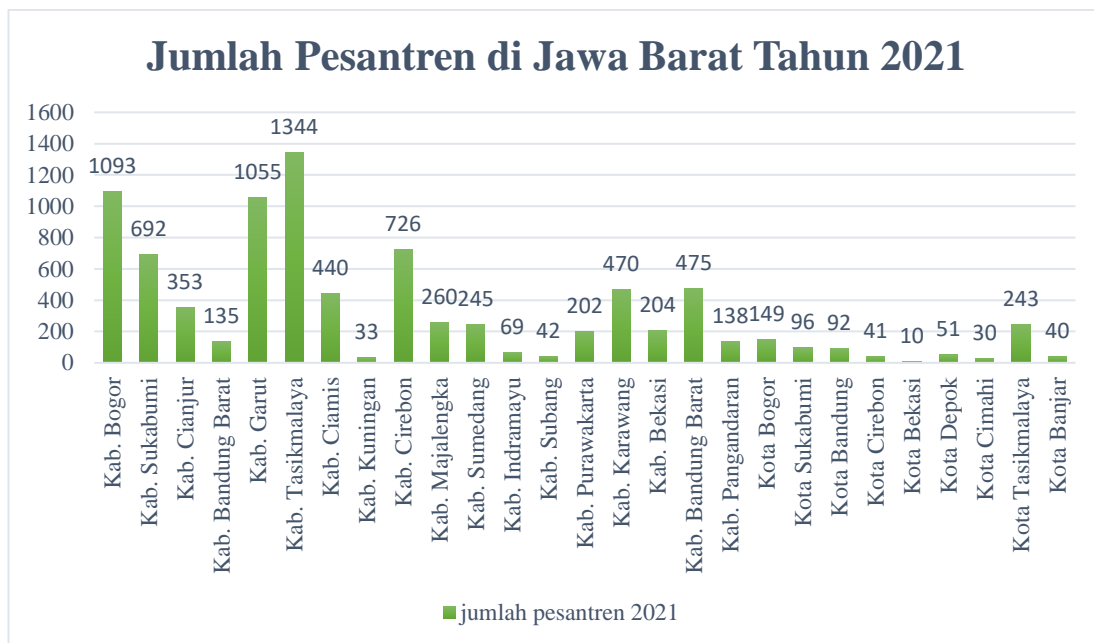
Gambar 1. 2 Jumlah Perolehan Suara dan Kursi DPR-RI Tahun 2019-2024

Sumber : KPU.go.id

Setelah penyelenggaraan pemilu 2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil menyumbangkan salah satu kader terbaik yaitu ketua umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar untuk menempati jabatan wakil DPR-RI. Selain itu juga mendapatkan jatah 4 Menteri yaitu Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi, Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan namun karena beberapa faktor beliau digantikan oleh Muhammad Lutfi.

Ditingkat provinsi Jawa Barat Partai PKB menunjukkan peningkatan suara di pemilu Legislatif 2019. Dengan program dan pendekatan terhadap masyarakat serta kuatnya kaum Nahdliyin ditopang dengan solidnya organisasi NU di Jawa Barat membuat Partai PKB mendapat 1.896.257 suara yang merupakan partai terbanyak urutan ke 5 dalam perolehan suara dan berhasil merebut 13 kursi DPRD tingkat Provinsi Jawa Barat. Capaian tersebut naik 100% dari pemilu Legislatif 2014 yang mendapatkan 867,073.657 suara merebut 7 kursi DPRD tingkat Jawa Barat. (KPU.go.id) Sedangkan dalam persaingan mendapatkan kursi DPRD tingkat Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Partai PKB berhasil memperoleh 136 kursi. Hasil ini naik dari pemilu 2014 yang hanya mendapatkan 97 kursi.

Anggapan yang ada dimasyarakat karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan oleh para ulama maka terbentuklah stigma partai yang islami atau partai santri. Kebanyakan pendukung atau kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berasal dari pesantren yang tradisional. di Jawa Barat pesantren banyak didirikan di daerah kabupaten yang mempunyai basis jamaah begitu banyak. Sehingga para pendiri-pendiri pwsantren terutama kaum Nahdliyin dapat menggiring jamaahnya untuk bisa bergabung dengan Partai Kebangkita Bangsa (PKB)



Gambar 1. 3 Jumlah Pesantren di Jawa Barat Tahun 2021

Sumber : (Data Jabar, 2021)

Keberhasilan yang diraih oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat pusat dan provinsi tidak sama dengan pencapaian di tingkat kota Bandung. Sejak awal mengikuti pemilu dari tahun 1999 suara partai tidak begitu memuaskan terbukti pada tahun 1999 di kota Bandung hanya mampu merebut 2 kursi anggota DPRD. Pada pemilu tahun 2004 dan 2009 Partai PKB bahkan tidak mendapatkan jatah kursi Anggota DPRD tingkat kota Bandung. Hal ini cukup mengejutkan karena secara skala nasional partai PKB menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia.

Pada periode Pemilu tahun 2014 Partai PKB mulai Kembali mendapatkan 1 kursi Anggota DPRD tingkat Kabupaten/ Kota dari total 50 calon legislatif yang diusung pada miasng-masih sebanyak 6 Dapil. Berdasarkan data yang diperoleh pada situs web DPRD kota Bandung ([dprd.bandung.go.id](http://dprd.bandung.go.id)) yang mendapatkan jatah kursi untuk menduduki DPRD adalah Asep Mahyudin, S.Ag. pencapain ini menjadi sebuah awal kembalinya suara PKB di kota Bandung karena mendapatkan sekitar 2 kali lipat



suara yang di tahun 2009 mendapatkan 18.000 suara meningkat di tahun 2014 menjadi 42.782 suara.

Setelah Pemilu 2014 partai PKB turut andil dalam pemilihan calon wali kota (Piwalkot) Bandung pada tahun 2018. Pada pemilu ini ada tiga kandidat yang masuk untuk menjadi calon wali kota Bandung. Partai Kebangkita Bangsa (PKB) mendukung pasangan no urut 1 yaitu Nurul Arifin dan Chairul Yakin Hidayat yang juga berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Golkar. Namun setelah melakukan proses kampanye yang begitu sengit akhirnya calon wali kota dan wakil wali kota Bandung yaitu pasangan No urut 1 Nurul Arifin dan Chairul Yakin Hidayat harus menerima kekalahan. Pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini dimenangkan oleh pasangan no urut 3 yaitu Oded Muhammad Danial dan Yana Mulyana. Tentu ini akan menjadi sebuah evaluasi dari partai PKB kota Bandung untuk dapat memperbaiki kinerja dan mendapatkan simpati dari masyarakat kedepannya

No. Urut	Calon Wali Kota	Calon wakil Wali Kota	Perolehan Suara
1	Nurul Arifin	Chairul Yakin Hidayat	24,02%
2	Yossi Irianto	Aries Supriatna	26,07%
3	Oded Muhammad Danial	Yana Mulyana	49,91 %

*Tabel 1. 1 Calon Wali Kota Bandung*

Sumber : KPU

Selanjutnya persaingan politik di Pemilu 2019 Kota Bandung dalam rangka mendapatkan kursi DPRD tingkat Kabupaten/ Kota, Partai PKB hanya mendapatkan

jatah 2 kursi. Data tersebut berdasarkan surat keputusan KPU Kota Bandung Nomor 449/PL.01.9-Kpt/3273/Kota/VII/2019 dari 16 Partai politik hanya 9 Partai yang menempatkan kader-kader terbaiknya untuk menduduki kursi DPRD Kota Bandung. Diantarnya PKS 13 kursi, Gerindra 8 kursi, PDIP 7 kursi, Golkar 6 kursi, Nasdem 5 kursi, Demokrat 5 kursi, PSI 3 kursi, PKB 2 kursi, PPP 1 kursi. Partai PKB kota Bandung berhasil merebut kursi anggota DPRD pada Dapil 3 oleh H. Erwin, SE dengan perolehan suara 15.490 dan Dapil 6 oleh Asep Mahyudin, M.Ag dengan perolehan suara 5.735 suara.

Jika melihat sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah didukung *Nahdhatul ulama* (NU) yang merupakan salah satu Organisasi Masyarakat Islam terbesar di Indonesia dan telah tersebar di beberapa daerah tapi faktanya di kota Bandung hal tersebut tidak sama dengan harapan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbukti dengan perolehan suara di beberapa pemilu kota Bandung tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di masyarakat Kota Bandung masih jauh dari competitor partai politik lainya dan citra yang diharapkan oleh partai belum sesuai dengan fakta dilapangan karena salah satu ukuran keberhasilan partai politik adalah dari perolehan suara ketika pemilu.

Saat ini ditahun 2021 dibawah kepemimpinan Kang Erwin yang sebenarnya tidak mempunyai background lulusan pasantren, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung membuat beberapa perubahan salah satunya akan memaksimalkan generasi milenial untuk dapat terlibat ke dalam partai politik. Hal ini akan di kalaborasikan dengan stigma partai yang merupakan partai islam tradisonal. Bagaimana cara mengelola Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang islami tradisonal dipadukan dengan konsep modern agar dapat diterima di masyarakat kota Bandung

serta bisa membentuk citra yang positif di masyarakat terhadap partai dan anggota yang ada didalamnya.

PKB kota Bandung yang saat ini hanya memiliki 2 kursi anggota DPRD mempunyai target untuk pemilu di tahun 2024 yaitu merebut 7 kursi anggota DPRD kota Bandung dan mencoba untuk bersaing mendapatkan kursi wali kota Bandung. Untuk mendapatkan target tersebut tentu tidak mudah perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh PKB kota Bandung. Salah satunya adalah membentuk citra pada masyarakat. Citra PKB begitu kuat dengan sosok Gusdur yang merupakan presiden ke-4 Indonesia. Apakah citra PKB di kota Bandung terpengaruhi oleh citra Gusdur lalu bagaimana PKB kota Bandung membangun citra pada masyarakat kota Bandung, citra seperti apa yang diharapkan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk membentuk citra PKB kota Bandung pada masyarakat kota Bandung. Menjadi hal yang menarik bagi peneliti. Maka dari itu peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dan menyusun skripsi dengan judul **Strategi Komunikasi Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung dalam Membangun Citra Positif pada Masyarakat.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah peneliti tulis dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti Bagaimana proses strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung dalam membangun citra positif pada masyarakat?

## **1.3 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung dalam membangun tanggapan masyarakat terhadap kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)?

2. Bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan dalam membangun citra yang diharapkan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung di masyarakat ?
3. Bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung dalam membangun sikap kadernya untuk membangun citra partai di masyarakat?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari masalah yang ditulis diantaranya :

1. Mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung dalam membangun tanggapan masyarakat terhadap pada kadernya.
2. Mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan dalam membangun citra yang diharapkan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung di masyarakat
3. Mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung dalam membangun sikap kadernya untuk membangun citra di masyarakat.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat secara Teoritis**

- Peneliti dapat menyumbangkan hasil penelitian mengenai Komunikasi Politik yang berjudul Strategi Komunikasi Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung dalam Membangun Citra pada Masyarakat.

- Peneliti dapat memberikan sumbangan penelitian untuk referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dibidang Komunikasi Politik.
- Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran khususnya di bidang komunikasi politik

### **1.5.2 Manfaat secara Praktis**

- Manfaat bagi peneliti yaitu untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan.
- Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat yaitu dapat menambah informasi mengenai Partai Kebangkitan Bangsa kota Bandung.
- Penelitian ini dapat berguna bagi DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung untuk mendalami proses komunikasi politik dalam upaya membangun citra pada masyarakat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam menulis skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan agar mempermudah pembaca dalam mengetahui apa saja pembahasan-pembahasan yang ada disetiap bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi, lokasi dan waktu penelitian.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari rangkuman teori XYZ, kajian/ penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.
- BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, informan kunci, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari obyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V PENUTUP, terdiri dari simpulan dan rekomendasi.

### 1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor PKB Kota Bandung di Jl. Sudirman No.803 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon kota Bandung dan Rumah Ketua PKB Kota Bandung di Jl. Wuluku Raya No. RT.007 RW.010 Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung. Alasan memilih lokasi tersebut karena sumber informasi kunci ada di Ketua, Sekretaris Jendral Partai, dan pihak internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kota Bandung. Waktu penelitian skripsi ini disajikan dalam sebuah tabel berikut :

No.	Nama Kegiatan	2021																				2022			
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	BAB I																								
2	BAB II																								
3	BAB III																								
4	Sidang UP																								
5	BAB IV																								
6	BAB V																								
7	Sidang Skripsi																								

Tabel 1. 2 Waktu Penelitian